

# PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PELATIHAN, DAN PERAN PENDAMPINGAN DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISKEUDES DI 29 KECAMATAN KABUPATEN SERANG

Palahiyah<sup>1</sup>, Shoma Febriyani<sup>2</sup>, Mela Sandra<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Primagraha

E-Mail:

<sup>1</sup>[falahiyah93@gmail.com](mailto:falahiyah93@gmail.com)

<sup>2</sup>[shomafebriyani@gmail.com](mailto:shomafebriyani@gmail.com)

<sup>3</sup>[melasandra16@gmail.com](mailto:melasandra16@gmail.com)

---

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia (X1) pelatihan (X2) peran pendampingan desa (X3) terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES (Y) di 29 Kecamatan Kabupaten Serang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kecamatan di Kabupaten Serang dengan sampel yang digunakan adalah sebanyak 87 responden dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini melakukan survey dengan menyebarkan kuisioner. Alat analisis data yang digunakan adalah SPSS 16.0. Penelitian ini memiliki hasil bahwa kualitas sumber daya manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES (Y) pelatihan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES (Y) peran pendampingan desa (X3) tidak berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES (Y).

---

## ARTICLE INFO

### Keywords:

Kualitas Sumber Daya Manusia; Pelatihan; Peran Pendampingan Desa; Efektivitas Penggunaan SISKEUDES

### Article History

Submitted:

09-01-2025

Accepted:

28-01-2025

Published:

29-01-2025

---

*Corresponding Author:*

Palahiyah, [falahiyah93@gmail.com](mailto:falahiyah93@gmail.com)

## 1. INTRODUCTION

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, pembangunan perlu dilakukan dari bagian paling kecil, yaitu dari desa. Oleh karena itu dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, setiap pemerintah desa memiliki amanat untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk pengelolaan dana dan kekayaan milik desa. Dalam rangka untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyediakan dana desa yang disebar ke desa – desa yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Dana desa ini akan bertambah setiap tahunnya, desa sebagai penerima dana tersebut juga memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan penggunaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan mempertanggungjawabkannya. Hal ini menuntut pemerintah desa akan pentingnya menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaannya, sehingga APBDes dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat dan pemerintah sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik (Anonim, 2016; Yustisia, 2015)

Desa penerima dana diinstruksikan untuk menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penyusunan laporan keuangannya. Aplikasi SISKEUDES, dikembangkan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangannya. Dengan diterapkannya aplikasi SISKEUDES ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan dalam penyusunan pelaporan APBDes. Akan tetapi, untuk menggunakan suatu sistem, dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil (Alfiansyah et al., 2024; Sari et al., 2024). Oleh karena itu, mengingat bahwa SISKEUDES adalah suatu system yang berbasis komputerisasi, aparatur desa yang bertanggungjawab atas laporan keuangan desa dituntut bukan hanya mampu menguasai ilmu akuntansi, tetapi juga mampu menguasai ilmu komputer. Sehingga penggunaan SISKEUDES ini jadi lebih efektif (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2019; BPKB Jawa Timur, 2001).

Hal tersebut merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2017) yang menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Roviyantje (2011). Dimana penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Komarasari (2017) menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Pelatihan juga dibutuhkan agar penggunaan SISKEUDES bisa lebih efektif. Hal ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Muzahid (2014), hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2013), dimana penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi keuangan daerah. Dikarenakan aplikasi SISKEUDES ini termasuk aplikasi yang masih baru, diperlukan juga peran pendampingan desa. Seperti pada hasil penelitian yang dilakukan Pahlevi (2017). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peran pendampingan desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2017), dimana hasil penelitian tersebut menyimpulkan peran pendampingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan SISKEUDES.

### **1.1 Efektivitas Penggunaan SISKEUDES**

Hidayat (1986) menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Sedangkan Abdurahmat (2003:92) menyatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan pekerjaan yang tepat pada waktunya.

Secara umum efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin tinggi efektivitas penggunaan SISKEUDESnya, semakin tinggi pula keberhasilan dalam mencapai tujuan dari penggunaan SISKEUDESnya. Mulyadi (2001) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Widjianto (2001:4) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi

keuangan, memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan, pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan perusahaan, efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan, serta penyajian laporan keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Sedangkan untuk komponen-komponen sistem informasi akuntansi adalah sumber daya manusia yang terlatih, prosedur keuangan dan akuntansi, formulir data keuangan, aplikasi akuntansi, serta perangkat keras berupa perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan.

Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Seperti yang sudah disahkan dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, dimana desa diberi amanat untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya keuangan desa. Serta melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Implementasi tersebut selaras dengan program pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015 sampai 2019, yaitu "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI". Sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 2015 telah dialokasikan dana desa sebesar kurang lebih 20,77 triliun rupiah dan pada 2016 dana desa yang dialokasikan kurang lebih sebesar 46,9 triliun rupiah, yang disebar ke seluruh desa di Indonesia. Dan ini akan bertambah setiap tahunnya dan akan mencapai lebih dari 1 miliar untuk tiap desanya. Selain itu, desa juga mengelola pendapatan asli desa dan pendapatan transfer lainnya yang terdiri dari hasil pajak dan retribusi kabupaten dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan kabupaten.

Besarnya peran yang diterima oleh desa serta harapan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alamnya, tentu disertai juga dengan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ini, pengembangan aplikasi sistem informasi akuntansi untuk desa telah dipersiapkan sejak awal, diikuti dengan adanya perhatian yang lebih dari komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tanggal 13 Juli 2015, aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang awalnya bernama Sistem Manajemen Desa (SIMDA) dilaunching sebagai jawaban atas pertanyaan yang ada di Rapat Dengar Pendapat (RPD) komisi XI pada tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan tentang kepatian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKB serta memenuhi rekomendasi KPK untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementrian Dalam Negeri.

SISKEUDES sebagai suatu sistem informasi dengan fitur-fitur yang dibuat sederhana dan user friendly sehingga mudah untuk digunakan. Aplikasi ini dapat menghasilkan output berupa laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan seperti Dokumen Penatausahaan, bukti penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), dan lain-lain. Aplikasi ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu sesuai peraturan, dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control), dan didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi. Oleh karena itu penggunaan aplikasi SISKEUDES ini ditujukan untuk meningkatkan kemudahan dalam hal pencatatan, penyusunan, dan pelaporan keuangan desa. Dengan begitu, kualitas laporan keuangan desa bisa meningkat.

## **1.2 Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumarsono (2003) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM

menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat. Sedangkan Hasibuan & Malayu (2003) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Jadi, secara umum, kualitas sumber daya manusia adalah tingkatan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki individu untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi kemampuan dan pengetahuannya, semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya.

### **1.3 Pelatihan**

Mathis (2002) menyatakan bahwa Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Jadi, pelatihan yang diberikan itu berhubungan dengan tujuan organisasi, dimana pelatihan dilakukan untuk mendapat atau meningkatkan kemampuan yang dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Sedangkan Ivancevich (2008) mengemukakan tiga butir penting tentang Pelatihan. Pertama, pelatihan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/ sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Kedua, pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Dan Ketiga, pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Pelatihan menurut Dessler (2009) adalah Proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. Jadi, secara umum pelatihan adalah usaha atau proses untuk meningkatkan kemampuan yang akan dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaannya. Semakin baik pelatihannya, semakin baik peningkatannya.

### **1.4 Peran Pendampingan Desa**

Ahmadi (1982) menyatakan bahwa peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 1 Nomor 14, disebutkan bahwa Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Adapun tujuan pendampingan desa disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 2 adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa,
- 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif,
- 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan
- 4) Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Ruang lingkup pendampingan desa meliputi:

- 1) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
- 2) Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
- 3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen. Sedangkan untuk pelaksanaannya, pendampingan desa dilakukan oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau pihak ketiga.

Pendampingan desa sebagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, harus menjadi motivasi bagi perangkat desa. Mulyasa (2002) menyebutkan bahwa Motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, pendamping desa memiliki tugas untuk membimbing dan memotivasi perangkat desa sehingga perangkat desa bisa meningkatkan keefektifan dalam penggunaan SISKEUDES.

## 2. METHOD

Desain penelitian ini berupa penelitian kuantitatif yang menjelaskan kejadian empiris yang disertai data statistic (Jayanti et al., 2024; Sugiyono, 2011). Penelitian ini menggunakan metode survey sebagai cara untuk mengumpulkan data. Survey dilakukan dengan memberikan angket atau kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada responden yaitu Perangkat Desa di 29 Kabupaten Serang. Metode pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengetahui penilaian seseorang terhadap suatu hal. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di 29 Kecamatan, dalam hal ini adalah camat, bendahara, dan sekertaris atau jajarannya, di 29 Kecamatan. Total Populasi adalah 87 Responden dari 29 Kecamatan dikalikan 3 orang pegawai di 29 Kecamatan.

## 3. RESULT AND DISCUSSION

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kualitas sumber daya manusia, pelatihan dan peran pendampingan desa terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Uji t  
 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.046	1.701		2.379	.020
Kualitas SDM	.231	.085	.257	2.723	.008
Pelatihan	.408	.072	.535	5.682	.000
Peran Pendampingan Desa	-.042	.035	-.100	-1.201	.233

- 1) Hasil pengujian yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan kualitas SDM (X1) dengan nilai  $t$  hitung  $2,723 > t$  tabel  $1,988$  dan nilai signifikansi  $0,008 < 0,05$ , artinya kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES. Hasil ini sejalan dengan hipotesis pertama bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Roviyantie (2011) yang melakukan penelitian terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya dan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2017) yang melakukan penelitian terhadap perangkat desa di Kabupaten Buleleng.
- 2) Hasil pengujian yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan pelatihan (X2) dengan nilai  $t$  hitung  $5,682 > t$  tabel  $1,980$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  artinya pelatihan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES. Hasil ini mendukung hipotesis kedua bahwa pelatihan berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES.
- 3) Hasil pengujian yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan peran pendampingan desa (X3) dengan nilai  $t$  hitung  $-1,201 < t$  tabel  $1,980$  dengan nilai signifikansi  $0,233 > 0,05$  artinya peran pendampingan desa tidak berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES. Hasil ini tidak mendukung hipotesis ketiga bahwa peran pendampingan desa berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES.

#### 4. CONCLUSION

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dengan harapan bahwa penelitian dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran dari peneliti, yaitu:

- 1) Kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas SDM, semakin baik efektivitas penggunaan SISKEUDES. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kualitas SDM, maka semakin buruk pula efektivitas penggunaan SISKEUDES. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% yaitu  $0,008 > 0,05$  mengindikasikan bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES di Kecamatan Moyo Hulu, Moyo Hilir, dan Moyo Utara.
- 2) Pelatihan berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES. Hal ini berarti apabila pelatihan semakin baik maka mengakibatkan efektivitas penggunaan SISKEUDES juga semakin baik, dan sebaliknya apabila pelatihan yang dilakukan semakin buruk, maka efektivitas penggunaan SISKEUDESnya juga semakin buruk. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% yaitu  $0,000 > 0,05$  mengindikasikan bahwa pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES di Kecamatan Moyo Hulu, Moyo Hilir, dan Moyo Utara.
- 3) Peran pendampingan desa tidak berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES. Hal ini berarti baik ataupun buruknya peran pendampingan desa tidak mempengaruhi efektivitas penggunaan SISKEUDES. Nilai signifikansi lebih besar dari 5% yaitu  $0,233 > 0,05$  mengindikasikan bahwa peran pendampingan tidak berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES di Kecamatan Moyo Hulu, Moyo Hilir, dan Moyo Utara.

#### REFERENCE

- Ahmadi, A. (1982), *Psikologi Sosial*. Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Alfiansyah, M. W., Switrayana, I. N., & Mulawarman, L. (2024). Peran Business Intelligence Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *ECONOMIST: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 13-19.
- Anonim (2016), <http://ppid.sumbawakab.go.id/informasi-659-kebijakan-perencanaan-pembangunan-kawasan-perdesaan.html>, diakses pada 8 Juli 2018, Sumbawa

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2019), <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Pengawasan-Keuangan-Desa-dengan-Aplikasi-SISKEUDES.bpkp>, diakses pada 2 April 2018, Sumbawa
- BPKB Jawa Timur (2001), *Modul Pendampingan*, Surabaya
- Dessler, G. (2009), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Index.
- Fatimah (2013), *Pengaruh Pelatihan, Dukungan Manajemen Puncak, dan Kejelasan Tujuan Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah* (Skripsi: Universitas Negeri Padang).
- Hasibuan, H. & Malayu, S. P. (2003), *Manajemen sumber daya manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat (1986), *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ivancevich, J. M. (2008), *Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga.
- Jayanti, N. N. S. D., Faerrosa, L., & Jati, L. J. (2024). Pengaruh Relationship Marketing, Experiential Marketing dan Brand Trust terhadap Loyalitas Pengguna Kurir Joki di Kota Mataram. *ECONOMIST: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(4), 24-31.
- Komarasari, W. (2017), *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaat Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah* (Skripsi: Universitas PGRI Yogyakarta).
- Mathis, R. L. & Jackson, J. H. (2002), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Salemba Empat.
- Mulyadi (2001), *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta, Salemba Empat.
- Mulyasa, E. (2002), *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Muzahid, M. (2014), *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, (Skripsi: Politeknik Negeri Lohsemawe).
- Pahlevi, R. (2017), *Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Skripsi: Universitas Pendidikan Ganesha).
- Republik Indonesia (2014), Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Republik Indonesia (2015), Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
- Roviyantie, D. (2011), *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah* (Skripsi: Universitas Siliwangi).
- Sari, R., Chandra, H., & Dethan, S. H. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perbankan dan Pelatihan Karyawan terhadap Produktivitas Kerja pada Bank Mandiri. *ECONOMIST: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(4), 46-60.
- Sugiyono (2011), *METODE Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, S (2003), *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiguna, I. M. D. P. D. (2017), *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, serta Peran Pendampingan Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sisitem Keuangan Desa (SISKEUDES)* (Skripsi: Universitas Pendidikan Ganesha).
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.